

BAB IV

PENUTUP

1.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kegagalan MINUSMA dalam menstabilkan keamanan di Mali tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi berbagai faktor operasional, politik, dan struktural yang saling berkaitan. Meskipun MINUSMA dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2100 Tahun 2013 dengan mandat untuk melindungi masyarakat sipil, mendukung proses politik, memulihkan otoritas negara, serta menciptakan stabilitas keamanan, implementasi mandat tersebut menghadapi berbagai kendala yang membuat tujuan misi tidak tercapai secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pertama berasal dari kompleksitas konflik di Mali yang berkembang dari pemberontakan separatis menjadi konflik multidimensional yang melibatkan kelompok teroris transnasional, konflik komunal antaretnis, serta lemahnya kapasitas negara. Perubahan karakter konflik tersebut membuat MINUSMA harus menjalankan mandat di lingkungan operasi yang sangat berbahaya, sementara kemampuan personel, dukungan logistik, dan sumber daya yang dimiliki tidak sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika ancaman yang berkembang.

Faktor kedua adalah implementasi mandat MINUSMA yang lebih berorientasi pada stabilisasi negara dibandingkan perlindungan masyarakat secara langsung. Meskipun perlindungan masyarakat sipil menjadi salah satu mandat utama MINUSMA, pelaksanaan operasi lebih banyak diarahkan pada dukungan terhadap institusi negara, pengamanan wilayah strategis, dan stabilisasi politik. Akibatnya, berbagai persoalan yang menjadi sumber ketidakamanan masyarakat, seperti konflik komunal, marginalisasi, kemiskinan, serta lemahnya akses terhadap layanan dasar, tetap berlangsung selama pelaksanaan misi.

Faktor ketiga berkaitan dengan memburuknya hubungan antara MINUSMA dan pemerintah Mali setelah kudeta militer tahun 2020. Perubahan politik domestik, meningkatnya sentimen anti-Barat, pembatasan ruang gerak MINUSMA, hingga keputusan pemerintah Mali untuk mengakhiri mandat misi pada tahun 2023 semakin mempersempit kemampuan MINUSMA dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, masuknya Wagner Group sebagai mitra keamanan baru pemerintah Mali turut mengubah konfigurasi keamanan dan memperbesar tantangan yang dihadapi MINUSMA dalam melaksanakan mandatnya.

Melalui teori *Welsh School*, penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan MINUSMA tidak hanya tercermin dari belum tercapainya stabilisasi keamanan, tetapi juga dari belum terwujudnya *security as emancipation*, yaitu kondisi ketika masyarakat terbebas dari rasa takut, kekerasan, dan berbagai bentuk ketidakamanan struktural. Selama pelaksanaan misi, masyarakat Mali masih menghadapi tingginya angka korban sipil, pengungsian, pelanggaran hak asasi manusia, kerawanan pangan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat belum berhasil diwujudkan meskipun operasi perdamaian telah berlangsung selama satu dekade.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan MINUSMA tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan operasional di lapangan, tetapi juga dengan orientasi pelaksanaan mandat yang masih lebih menitikberatkan pada stabilisasi negara daripada pemenuhan kebutuhan keamanan masyarakat. Dalam Teori *Welsh School*, operasi perdamaian akan lebih efektif apabila keberhasilannya tidak hanya diukur dari pulihnya institusi negara atau berakhirnya konflik bersenjata, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan keamanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui perlindungan terhadap warga sipil, pengurangan kekerasan struktural, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perdamaian. Dengan demikian, pengalaman MINUSMA memberikan pelajaran bahwa keberhasilan operasi perdamaian membutuhkan keseimbangan antara stabilisasi negara dan keamanan yang berpusat pada manusia (*human-centered security*).

4.2. Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memperkuat pendekatan yang berorientasi pada keamanan manusia (human security) dalam perencanaan maupun pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian. Keberhasilan misi tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuan menjaga stabilitas negara atau mendukung pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat sipil memperoleh perlindungan, rasa aman, dan akses terhadap kebutuhan dasar selama konflik berlangsung.

Selain itu, PBB perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapan operasi perdamaian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi misi. Pelibatan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, perempuan, dan komunitas lokal diharapkan dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat legitimasi misi di tingkat lokal. PBB juga perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah negara tuan rumah tanpa mengurangi komitmen terhadap perlindungan masyarakat sipil dan penghormatan hak asasi manusia. Pengalaman MINUSMA menunjukkan bahwa hubungan yang tidak harmonis antara misi PBB dan pemerintah Mali berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan mandat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih adaptif agar operasi perdamaian tetap dapat menjalankan mandat perlindungan masyarakat sipil sekaligus menjaga kerja sama dengan pemerintah negara tuan rumah.